



Available online at

<http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jeamm/issue/view/244>

JEAMM, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2019

Hal. 55-69

E-ISSN 2686-4932 P-ISSN 2686-4932

# JEAMM

## **KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: MEDIASI PERTUMBUHAN EKONOMI**

**Muhsin N. Bailusy**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun

Email: [muhsin.bailusy@unkhair.ac.id](mailto:muhsin.bailusy@unkhair.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empirik pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan menganalisis secara empirik apakah pertumbuhan ekonomi mampu memediasi kinerja keuangan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan pada sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, dengan menggunakan data yang bersumber dari BPS provinsi Maluku Utara maupun BPS kabupaten/kota, data Laporan Bank Indonesia dan Laporan Kementerian/Lembaga dari tahun 2014-2018. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan metode Analisis Jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima hipotesis yang diajukan, tiga hipotesis terdukung dan dua hipotesis tidak terdukung.

**Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi**

Dikirim, 11 September 2019  
Revisi, 15 September 2019  
Diterima, 28 September 2019



Jurnal Ekonomi, Akuntansi  
dan Manajemen  
Multiparadigma  
Volume 1, Nomor 1,  
Oktober 2019

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze empirically the influence of Regional Government Financial Performance on the Human Development Index, Economic Growth and analyze empirically whether Economic Growth is able to mediate Financial Performance on the Human Development Index. This research was conducted in ten districts/ cities in North Maluku Province, using data sourced from BPS North Maluku province and BPS districts/ cities, data Bank Indonesia Report and Ministry/ Institution Report from 2014-2018. Data analysis techniques in this study useregression analysis with the Path Analysis method. The results showed that of the five hypotheses proposed, three were supported and two were not supported.*

**Keywords: Regional Financial Performance, Human Development Index, Economic Growth**

## PENDAHULUAN

Tujuan pemberlakuan otonomi daerah mengisyaratkan adanya pengakuan terhadap keanekaragaman sumberdaya yang dimiliki daerah dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri melalui *local self government* untuk melaksanakan model pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokalnya (*local specific*). Selain itu, diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut akan mempunyai implikasi yang luas dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Dimana, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam merencanakan arah pembangunannya. Di sisi lain, pemerintah daerah akan semakin dituntut untuk lebih mandiri di dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya (Assidiqqi, 2005). Otonomi daerah juga mengisyaratkan semakin pentingnya pendekatan pembangunan dengan basis pengembangan wilayah, bukan sekedar pendekatan pembangunan dengan pendekatan sektoral. Pembangunan berbasis pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan inter-sektoral, inter-spasial, serta antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam dan antar-daerah (Saefulhakim, 2004).

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola secara mandiri, kreatif dan inovatif untuk mengatur daerahnya sesuai karakteristik daerah, potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan Otonomi Daerah sudah berjalan lebih dari dua puluh dua tahun, tetapi masih banyak permasalahan yang belum mampu diselesaikan secara signifikan, masih tingginya angka kemiskinan di daerah otonomi, pengangguran serta tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih sangat besar. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khusaini, 2006). Unsur penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia (Ekawarna, Sam. dan Rahayu, 2009). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim dan Kusufi, 2012). Untuk menjalankan pemerintahan yang diemban langsung oleh daerah, tentunya akan sangat bertopang dengan pendapatan daerah itu sendiri. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Christy dan Adi, 2009).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Suci dan Asmara, 2014).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif seperti melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program kepentingan publik. Adanya program-program untuk kepentingan publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya berdampak

pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Setyowati dan Suparwati, 2012). Untuk meningkatkan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata sehingga adanya jaminan bahwa semua masyarakat merasakan hasil pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah namun tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasa tidak akan memberi arti. Kabupaten/ kota di provinsi Maluku Utara sebagai daerah otonom, memiliki sejumlah masalah; diantaranya tingkat kemiskinan yang masih tinggi (tahun 2016 tingkat kemiskinan di provinsi Maluku Utara adalah 6,33 %) dimana kabupaten penyumbang penduduk miskin tertinggi adalah Halmahera Timur 15,48% dan kabupaten Halmahera Tengah 14,03%, pengangguran, pemerataan pembangunan, tingkat ketergantungan terhadap pembiayaan pusat masih sangat tinggi, serta pengelolaan potensi ekonomi daerah yang belum maksimal. Di lain sisi bahwa indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak juga masih jauh masih mengalami masalah yang perlu dibenahi. Masalah putus sekolah, masalah melek huruf, kesempatan untuk mengakses pendidikan, masih ada gizi buruk, standar hidup layak merupakan masalah mendasar yang patut dipikirkan oleh Pemerintah Daerah.

Secara implisit pemerintah daerah kabupaten/kota mutlak membutuhkan strategi dan sumber pendanaan yang berbasis kemandirian dalam melaksanakan pemerintahan dan proses pembangunan di daerahnya masing-masing (Mardiasmo, 2004). Pertanyaan adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya serta bagaimana dampaknya terhadap capaian tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan berbagai alasan argumentatif serta teoretik, penelitian tentang kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara dipandang perlu dilakukan, untuk menganalisis secara empirik Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi kabupaten dan kota di provinsi Maluku Utara.

Kebijakan desentralisasi fiskal tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya UU tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Apriana, 2010).

Indikator dari keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan mengelola sumberdaya daya ekonominya secara baik, salah satu indikatornya adalah mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Kemampuan mengelola Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat meningkat.

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Penelitian sebelumnya dikemukakan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM. PAD merupakan salah satu komponen dalam menghitung rasio derajat desentralisasi (Setyowati dan Suparwati, 2012).

**H1: Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kebijakan fiskal secara umum mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang terdiri dari tiga kegiatan pokok; pertama, kebijakan yang terkait pembelian pemerintah atas barang dan jasa; kedua, kebijakan terkait perpajakan; dan ketiga, kebijakan terkait pembayaran transfer (misal tunjangan keamanan sosial, pembayaran kesejahteraan) kepada rumah tangga (Nurhemi dan Suryani, 2015).

Menurut Halim (2004) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, (Suci dan Asmara, 2014)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Widodo, 2001).

Sumber-sumber PAD terdiri dari (1) Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak terdiri dari pajak provinsi dan kabupaten dan Kota, (2) Retribusi Daerah yang merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah, dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tertutup, dalam retribusi ini, pemerintah daerah diberi peluang untuk menambah jenisnya namun harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

**H2: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)****METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif, dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji variabel X yaitu pengaruh kinerja keuangan terhadap variabel Y yaitu Kesejahteraan Masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variable Intervening. Verifikasi berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak Lokasi penelitian ini di Provinsi Maluku Utara (sepuluh Kabupaten/Kota). Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 3 bulan Agustus-November 2019. Sumber data dalam penelitian ini

bersumber dari publikasi BPS provinsi Maluku Utara maupun BPS kabupaten/kota, serta data Laporan Bank Indonesia dan Laporan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan tema penelitian ini dari tahun 2014-2018.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yakni, 1) *Field Research*, yaitu pengumpulan data lewat mengkaji data-data berupa laporan yang dipublikasikan oleh BPS provinsi Maluku Utara, BPS Kabupaten/Kota, maupun laporan lembaga lain yang sesuai dengan penelitian ini. Data-data tersebut adalah data Laporan Realisasi APBD Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2014-2018, data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2014-2018 serta data PDRB provinsi Maluku Utara maupun kabupaten/kota, data PAD, data total pengeluaran, dan data jumlah dana transfer dari pemerintah pusat, 2) *Library Research*, yaitu pengumpulan data lewat kajian kepustakaan. Hal ini untuk menelaah teori yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan seluruh jumlah kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara, yakni sebanyak sepuluh kabupaten/kota dari tahun 2014-2019. Kesejahteraan Masyarakat diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (Y) mengukur tingkat pencapaian secara keseluruhan tiga dimensi pokok pembangunan yaitu umur panjang, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. IPM diukur berdasarkan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, paritas daya beli masyarakat sebagai variable dependen (Y). Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total daerah atas output barang dan jasa suatu daerah untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi sebagai variable Intervening (Z). Derajat Desentralisasi Fiskal (X1), merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Kemandirian Daerah (X2), merupakan perbandingan antara realisasi Dana Perimbangan dengan realisasi PAD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan metode Analisis Jalur (*Path Analysis*), digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable Intervening.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Data diolah dengan menggunakan program SPSS. Standar deviasi dalam ilmu statistik digunakan untuk membandingkan atau penyimpangan data dua kelompok atau lebih. Apabila standar deviasi suatu data tersebut kecil maka hal tersebut menunjukkan data-data tersebut berkumpul di sekitar rata-rata hitungannya, dan jika standar deviasinya besar maka hal tersebut menunjukkan penyebaran yang besar dari nilai rata-rata hitungannya. Salah satu penerapan standar deviasi ini misalnya dalam bidang Ekonomi. Gambaran mengenai variabel yang diteliti melalui proses pengelolaan dengan menggunakan program SPSS, variabel tersebut dapat dijelaskan secara statistik dibawah ini.

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_x1	50	.95	4.13	2.2193	.80803
SQRT_x2	50	.10	.52	.2529	.10638
SQRT_y	50	3.67	3.97	3.7933	.08161
SQRT_z	50	7.57	8.90	8.0284	.32696
Valid N (listwise)	50				

Sumber: data diolah 2019

**Tabel 2 Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	SQRT_x1	SQRT_x2	SQRT_y	SQRT_ipm
N	50	50	50	50
Mean	2.2193	.2529	3.7933	8.0284
Std. Deviation	.80803	.10638	.08161	.32696
Absolute	.179	.191	.117	.155
Positive	.179	.191	.117	.155
Negative	-.096	-.108	-.086	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z	1.262	1.353	.825	1.096
Asymp. Sig. (2-tailed)	.083	.051	.505	.181

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov untuk semua persamaan regresi signifikan di atas 0,05. Hal ini berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari hasil uji normalitas dengan uji statistik dapat disimpulkan bahwa model-model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan dalam tabel 3, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dari nilai *tolerance* yang lebih besar dari kriteria yang digunakan dan nilai VIF yang lebih kecil dari kriterianya untuk seluruh variabel. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen.

**Tabel 3 Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X1 → Y	0,232	4.318	Tidak terjadi
X2 → Y	0,232	4,318	multikolinearitas
X 1→Z	0,206	4.844	Tidak terjadi
X 2→Z	0,232	4.318	multikolinearitas
Y→Z	0,645	1.551	

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan uji glesjer yang dilakukan pada persamaan I, menunjukkan bahwa variable RDD dan RKKD nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa kedua variabel ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

**Tabel 4 Uji Glesjer Persamaan 1**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	.321	.082			3.925	.000
RDD	.030	.023	.362		1.314	.195
RKKD	-1.538	1.438	-.295		-1.069	.290

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil uji glesjer pada persamaan II, menunjukkan bahwa semua variable terbebas dari masalah heterokedastisitas, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi semua variable lebih besar dari 0,05.

**Tabel 6 Uji Glesjer persamaan 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-2.391	1.383			-1.729	.091
RDD	.018	.024	.216		.744	.461
RKKD	-1.550	1.409	-.297		-1.100	.277
PE	.266	.132	.476		2.014	.050
IPM	-.016	.014	-.251		-1.121	.268

Sumber: Data diolah 2019

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data *time series*. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin-Watson (Ghozali, 2013). Output uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	DL	DU	4-DU	DW
Struktur 1	1,462	1,628	2,372	0.739
Struktur 2	1,421	1,674	2,326	0.264

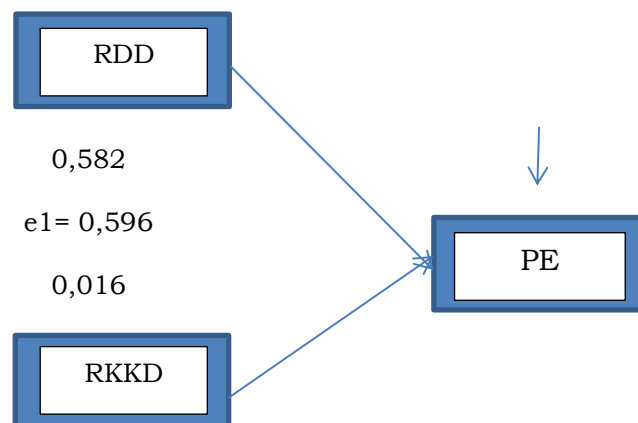
Sumber : Data diolah 2019

Mengacu pada output Regresi model I pada bagian table coefficient diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut yaitu X1 (RDD) = 0,021 lebih kecil dari 0,05 yang mengandung arti bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. sedangkan variabel X2 (RKKD) = 0,949 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variable 2 (RKKD) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Besarnya Nilai R<sup>2</sup> atau R Square yang terdapat pada table Summary adalah sebesar 0,355, hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh 1 dan X2 sebesar 35,5 %, sementara sisanya 64,5% merupakan kontribusi dari variable lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Untuk nilai e1 dapat dicari dengan menghitung  $e1 = \sqrt{1 - 0,335} = 0,596$  Maka jalur model struktur I dapat digambar sebagai berikut:

**Tabel 8 Hasil Path Analysis Persamaan Substruktur I**

Variabel Penelitian	Standardize Coefficient	Sig
Constant		0.000
X1	0,582	0.021
X2	0,016	0.949
R	0.596	
R Square	0.355	
Adj R Square	0.328	

Sumber : Data diolah 2019



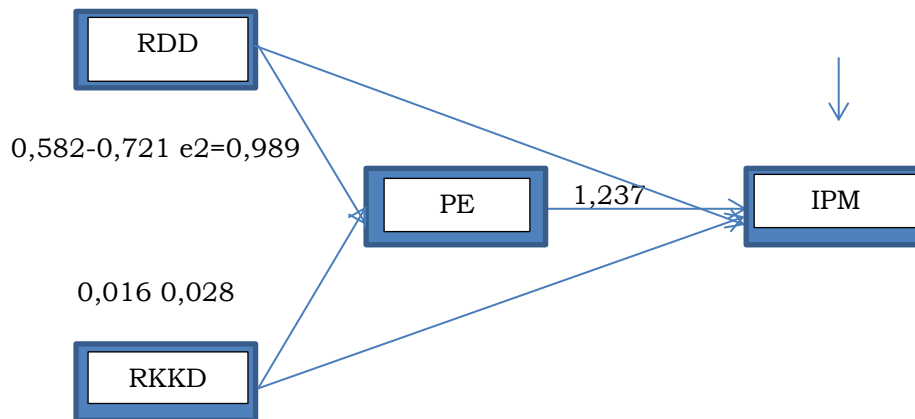
Berdasarkan output regresi model II pada bagian table coefficients diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variable yaitu, X1(RDD) = 0,000 lebih kecil dari signifikansi 0,005 yang berarti bahwa ada pengaruh antara 1 (RDD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variable X2 (RKKD) = 0,383 nilai koefisien dari variable ini lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang bermakna bahwa variable RKKD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan nilai signifikansi variable Y (PE) = 0,000 lebih kecil dari signifikansi 0,05 yang bermakna bahwa variable PE berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Besarnya nilai R<sup>2</sup> atau R Square sebesar 0,989 menunjukkan bahwa 98,9 % sumbangan pengaruh dari variable RDD, RKKD dan PE terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan sisanya sebesar 1,1% merupakan kontribusi variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai e<sub>2</sub> dapat dicari dengan menggunakan formula  $e_2 = \sqrt{1 - 0,989} = 0,994$ . Dengan demikian diagram jalur model II sebagai berikut

**Tabel 9 Hasil Path Analysis Persamaan Substruktur II**

Variabel Penelitian	Standardize Coefficient	Sig
Constant		0.000
X1	-0.721	0.000
X2	0,028	0.383
Y	1,237	0.000
R	0.994	
R Square	0.989	
Adj R Square	0.988	

Sumber : Data diolah 2019





Berdasarkan hasil uji persamaan jalur I dan persamaan jalur II maka dapat disimpulkan:

1. Rasio Derajat Desentralisasi secara langsung berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3. Rasio Derajat Desentralisasi secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
4. Rasi Kemandirian Keuangan Daerah secara langsung tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
5. Pertumbuhan Ekonomi secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
6. Pengaruh X1 (RDD) melalui Y (PE) terhadap Z (IPM), diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan X1 (RDD) terhadap Z (IPM) adalah sebesar -0,721. sedangkan pengaruh tidak langsung RDD (X1) terhadap Y (PE) terhadap Z (IPM) adalah perkalian antara nilai beta X1 (RDD) terhadap Y (PE) dengan nilai beta Y (PE) terhadap Z (IPM) yaitu :  $0,582 \times 1,237 = 0,7199$ . Maka pengaruh X1 (RDD) terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung atau  $-0,721 + 0,7199 = 0,0011$ . berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung -0,721 dan pengaruh tidak langsung 0,7199 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung x1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z.
7. Pengaruh X2 (RKKD) melalui Y (PE) terhadap Z (IPM), diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan X2 (RKKD) terhadap Z (IPM) adalah sebesar 0,016. sedangkan pengaruh tidak langsung RKKD (X1) terhadap Y (PE) terhadap Z (IPM) adalah perkalian antara nilai beta X2 (RKKD) terhadap Y (PE) dengan nilai beta Y (PE) terhadap Z (IPM) yaitu :  $0,016 \times 1,237 = 0,01979$ . Maka pengaruh X1 (RDD) terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung atau  $0,028 + 0,01979 = .$  berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung 0,028 dan pengaruh tidak langsung 0,01979 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung x1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z.
8. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa Hipotesis yang mengemukakan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi dapat diterima. Sedangkan rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi hipotesisnya di tolak.

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa derajat desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan derajat desentralisasi fiskal maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan Tiebout (1961) bahwa sistem desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah memainkan peran yang lebih penting daripada pemerintah pusat dalam penyediaan pelayanan publik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal merupakan rasio yang menjelaskan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan desentralisasi, artinya akan semakin tinggi pula kabupaten / kota di provinsi Maluku Utara dalam membiayai kegiatan perekonomian dan pemerintahannya. Dengan PAD yang tinggi ini akan memberikan perkembangan yang pesat karena daerah akan lebih maju dan berkembang perekonomiannya, sehingga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Menurut Samimi (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai tujuan dari desentralisasi fiskal dan efisiensi dalam alokasi sumberdaya di sektor publik serta sebagai bagian dari tujuan pemerintah secara eksplisit untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan pendapatan perkapita.

Salah satu Indikator dari keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan mengelola sumberdaya daya ekonominya secara baik, salah satu indikatornya adalah mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Kemampuan mengelola Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat meningkat.

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mahmudi (2010). Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Melalui rasio ini dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. Semakin besar PAD semakin leluasa pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat, yaitu pertumbuhan ekonominya akan semakin meningkat, yang pada akhirnya terjadi peningkatan indeks harapan hidup, pendidikan, dan paritas daya beli akan meningkat pula.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten / kota di Provinsi Maluku Utara tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal secara umum mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang terdiri dari tiga kegiatan pokok; pertama, kebijakan yang terkait pembelian pemerintah atas barang dan jasa; kedua, kebijakan terkait perpajakan; dan ketiga, kebijakan terkait pembayaran transfer (misal tunjangan keamanan sosial, pembayaran kesejahteraan) kepada rumah tangga (Nurhemi dan Suryani, 2015).

Menurut Halim (2004) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2004), terdapat empat pola hubungan tingkat kemandirian daerah antara lain:

- 1). Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah.
- 2). Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah dianggap sudah mampu melaksanakan otonomi.
- 3). Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4). Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, (Suci dan Asmara, 2014)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Widodo, 2001).

Sumber-sumber PAD terdiri dari: (1) Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak terdiri dari pajak provinsi dan kabupaten dan kota, (2) Retribusi Daerah yang merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah, dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tertutup, dalam retribusi ini, pemerintah daerah diberi peluang untuk menambah jenisnya namun harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian Ani dan Dwirandra (2014) dan penelitian Astuti (2015) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah atau kemandirian fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli dari daerah itu sendiri yang diwujudkan dalam bentuk realisasi anggaran. Kemandirian fiskal secara jelas menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat berdiri sendiri sehingga tidak tergantung pada dana-dana yang berasal dari luar. Daerah yang mandiri secara fiskal menunjukkan pemerintahan daerah yang telah mapan dan mampu melakukan pembangunan di daerahnya secara mandiri. Hal ini akan berdampak pada

pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana publik yang positif. Dengan demikian maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut seharusnya dapat tumbuh dengan positif pula.

Kemampuan daerah dalam menjalani otonomi daerah dapat diukur dengan kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal. Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan propinsi. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan propinsi semakin rendah.

Hasil penelitian ini, variable kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, ini menunjukkan bahwa walaupun kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara semakin mandiri, tetapi tidak memberikan efek terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini juga dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia kabupaten /kota rata-rata berada di kisaran 60-70 atau kategori sedang, dan hanya kota Ternate yang masuk kategori tinggi, yakni diatas 70. Selain itu tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara berada pada kriteria kemampuan daerah rendah sekali dengan prosentase kemandirian berada di kisaran (0-25%) dan dengan pola hubungan yang bersifat instruktif. Semakin tinggi rasio ini maka pemerintah daerah semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik sehingga peningkatan IPM dapat tercapai, namun dalam penelitian ini, rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Amalia dan Purbadharmaja (2014) serta Dewi dan Sutrisna, (2014)

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang baik juga dan hal itu akan mempengaruhi pembangunan manusia di daerah tersebut. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka Indeks pembangunan manusia juga akan tinggi. Pertumbuhan Ekonomi merupakan Salah satu indikator ekonomi makro yang paling sering digunakan oleh suatu negara khususnya bagi negara yang sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara (Diana dan Elvira, 2015). Semakin baik perekonomian atau semakin meningkat nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam perekonomian maka kemampuan atau potensi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi akan semakin meningkat (Faishal, 2016). Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi penerimaan secara mandiri. Jika semua itu sudah dapat di lakukan oleh pemerintah daerah maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. Dalam peningkatan perekonomian juga akan mempengaruhi pembangunan manusia, ketika pendapatan atau PDB per kapita meningkat berarti pengeluaran rumah tangga untuk meningkatkan pembangunan manusia menjadi naik (Prasetyo, 2013). Implikasi pada penelitian ini adalah jika pertumbuhan ekonomi daerah meningkat maka akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maulana & Bowo, 2013) dan (Ronald & Sarmiyatiningsih, 2014) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang

baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, fasilitas publik seperti pendidikan dan rumah sakit yang akan mendorong tingginya indeks pembangunan manusia.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja keuangan berdasarkan variabel rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa derajat desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan derajat desentralisasi fiskal maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
4. Pertumbuhan Ekonomi mampu memediasi pengaruh antara Rasio Derajat Desentralisasi dengan Indeks Pembangunan Manusia.
5. Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh antara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran untuk penelitian akan datang adalah:

1. Untuk meningkatkan derajat desentralisasi fiskal, dan meningkatkan tingkat kemandirian daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara perlu melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang belum maksimal yang bersifat komprehensif dan senantiasa berpihak pada masyarakat.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan tahun penelitian dan memperluas populasi dengan memilih kabupaten/kota yang di Indonesia.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan variabel lainnya pada variabel independen seperti rasio efisiensi maupun variabel lainnya.
4. Penelitian ini hanya menggunakan populasi penelitian pemerintah kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, ini mengakibatkan kemungkinan hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk semua tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data IPM yang merupakan data jadi dari BPS dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan BPS. Keterbatasan penelitian lainnya adalah aspek penting lainnya yang seharusnya dilibatkan dalam mengukur indeks pembangunan manusia seperti aspek kebijakan publik, aspek manajemen keuangan dan aspek psikologis personalitas pembuat keputusan di pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F.R. dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keresasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 6
- Ani, Ni Luh Nana Putri, dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.3 (2014):481-497.
- Apriana, Dina. dan Suryanto, Rudi., 2010, "Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. XI No. 1, Januari.

- Ardiansyah, Vitalis Ari dan Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi 17*. Lombok: SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram. [www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id](http://www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id). Di unduh tanggal 30 Oktober 2014.
- Assidiqqi, F. 2005. *Analisis Keterkaitan Pola Penganggaran, Sektor Unggulan, Sumberdaya Dasar Untuk Optimalisasi Kinerja Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kota Batu Provinsi Jawa Timur)*.
- Tiebout, C.M. 1961. "An Economic Theory of Fiscal Decentralization," NBER Chapters, in: *Public Finances: Needs, Sources, and Utilization*, pages 79-96, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Christy, Fhino Andrea dan Adi, Priyo Hari. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS*, Surabaya.
- Dewi, P.A.K dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 4, No. 1.
- Diana Sari dan Elvira Desiani. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Volume 1 No. 1, Maret 2015 ISSN: 2460-030X.
- Ekawarna. S. U, Sam. I dan Rahayu. S. 2009. Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, Vol.1 No.1, hal 49-66.
- Faishal Fadly. 2016. *Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah?*. *JIEP*-Vol. 19, No 2, November 2016 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas. Diponegoro.
- Halim, Abdul., 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Khusaini, Muhammad Dr. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFU Unibraw.
- Mardiasmo, 2004, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Percetakan YKPN.
- Maulana dan Bowo. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi Di Indonesia 2007-2011." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 4(3), 14-20.
- Nurhemi dan Suryani, Guruh, 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 2, Oktober 2015.
- Prasetyo, P. Eko. 2013. *Fundamental Makro Ekonomi*. Beta Offset. Yogyakarta.
- Ronald & Sarmiyatiningsih. 2014. "Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 20(1), 34-37.
- Saefulhakim, S. 2004. *Model Input-Output. Bahan Perkuliahan Analisis Kuantitatif Sosial Ekonomi Spasial*. Program Studi Perencanaan Wilayah. Sekolah Pasca Sarjana. IPB. Bogor.

- Samimi AJ, Lar SKP, Haddad GK, Alizadeh M. 2010. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*. 4(11): 5490-5495.
- Setyowati, Lilis dan Suparwati, Yohana Kus. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi* Vol. 9 No. 1.
- Suci, Stania Cahaya dan Asmara, Alla. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, hlm, 8-22 Volume 3 No 1.
- Todaro, M. P. 2000. *Economic Development*. Six Edition. Edinbourg Gate Harlow Addition Wesley Longman. New York University.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Widodo, Adi. Waridin. dan Maria, Johanna. 2001. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*